

**9 (SEMBILAN) PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

No.	Program	Kegiatan ANRI	Renja Arsip Nasional Republik Indonesia			Keterangan
			2011	2012	2013	
1.	Penataan Struktur dan Peningkatan Kinerja Birokrasi	1. Penataan Struktur Baru (2013) disesuaikan dengan Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia .	Revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia.	Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia.	
		2. Fasilitas Pembentukan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi Negeri	Penyusunan draft Peraturan Bersama Kepala ANRI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Arsip Perguruan Tinggi.	Penyelenggaraan Workshop Kearsipan bagi instansi Pusat dan Perguruan Tinggi sebanyak 100 Instansi.	Penyelenggaraan Workshop Kearsipan bagi instansi Pusat dan Perguruan Tinggi sebanyak 162 Instansi.	
		3. Akreditasi Lembaga Kearsipan, Unit Kearsipan, dan Lembaga Diklat Kearsipan	Survei akreditasi di 6 (enam) lembaga dan Unit Kearsipan yaitu Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Muara Enim (Sumatera Selatan), Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Tengah, Unit Kearsipan Badan Koordinasi dan Survei Pemetaan Nasional, Unit Kearsipan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Unit Kearsipan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.	5 Kegiatan Akreditasi Lembaga kearsipan, Unit Kearsipan dan Lembaga Jasa Kearsipan.	5 Lembaga/Unit Kearsipan (Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor dan 2 Unit Kearsipan Pusat).	
		4. Penataan Lembaga Kearsipan dan Unit Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> Bimbingan Konsultasi dan supervisi kearsipan di 12 (dua belas) Instansi Pusat. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan di 85 (delapan puluh lima) Instansi Pusat. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pada Pemerintah Provinsi (8 Provinsi-terlaksana). Rakornas Kearsipan bagi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (90 orang peserta-terlaksana) Supervisi Pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 96 Kabupaten -terlaksana) Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Teladan (LKD) (6 Finalis-terlaksana) 	<ol style="list-style-type: none"> Bimbingan Konsultasi dan supervisi kearsipan di 15 (lima belas) Instansi Pusat. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan di 85 (delapan puluh lima) Instansi Pusat. Penyusunan Rekomendasi standar Fungsi Lembaga Kearsipan Daerah (1 rekomendasi tertulis). Rekomendasi Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Kearsipan (1 rekomendasi tertulis). Rekomendasi Materi Desain Pembinaan Kearsipan Pada Pemerintah Daerah (1 rekomendasi tertulis). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pada Pemerintah Provinsi (11 Provinsi-terlaksana). 	<ol style="list-style-type: none"> Bimbingan Konsultasi dan Supervisi Kearsipan di 52 (lima puluh dua) Instansi Pusat. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan di 12 (dua belas) Instansi Pusat. Rapat Koordinasi Wilayah Penyusunan NSPK Kearsipan pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten /Kota Di Wilayah Timur (90 orang). Rapat Koordinasi Wilayah Penyusunan NSPK Kearsipan pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten /Kota Di Wilayah Tengah (90 orang). Rapat Koordinasi Wilayah Penyusunan NSPK Kearsipan pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten /Kota Di Wilayah Barat (90 orang). Supervisi pada Pemerintah Provinsi (Aset di 17 Provinsi, SIKS di 16 Provinsi, Masyarakat Sadar Arsip di 17 Provinsi) 	
			<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Database Pembinaan Kearsipan pada Provinsi/Kabupaten/Kota (1 paket data 33 Provinsi dan 497 kabupaten/kota). Rekomendasi mengenai Sistem Pembinaan Kearsipan pada Pemerintahan Regional di National Archives of Australia (NAA) (1 rekomendasi) 	<ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan pemilihan LKD Teladan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pada Pemerintah Provinsi 		

No.	Program	Kegiatan ANRI	Renja Arsip Nasional Republik Indonesia			Keterangan
			2011	2012	2013	
		5. Penguatan Pedoman Jabatan Fungsional Arsiparis		Pengumpulan data dan penyusunan konsep revisi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya.	Pembahasan dan pengesahan revisi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya.	
		6. Pengelolaan Dokumen Aset K/L Pemd	1. Workshop tentang perumusan Arsip Terjaga (Arsip Aset) (200 orang).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA) Barang Milik Negara (BMN)/aset. 2. Penyusunan pedoman (1 pedoman). 3. Pengesahan pedoman pengelolaan Arsip Aset. 4. Bimbingan teknis/TOT untuk instruktur ANRI. 5. Sertifikasi untuk instruktur ANRI. 6. Penyediaan sarana prasarana penyimpanan Arsip aset di ANRI. 7. Penataan Arsip Aset di ANRI. 8. Penyediaan bahan simulasi penataan Arsip Aset di ANRI (1 paket bahan simulasi dan visualisasi). 9. Penyusunan Instruksi Presiden/ Keputusan Presiden tentang Pengelolaan Arsip Aset. 10. Sosialisasi Program Nasional mengenai Program Pengelolaan Arsip Aset. 11. Sertifikasi untuk pengelola Arsip aset daerah. 12. Pembangunan Aplikasi Data Arsip Aset di ANRI. 13. Penyiapan pengajuan prasarana dan sarana tiap daerah (bantuan ANRI). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan teknis pengelolaan arsip aset di 15 (lima belas) Instansi Pusat. 2. Aplikasi Arsip Aset Tersedia. 3. 33 Provinsi telah memiliki minimal 5 (lima) orang Arsiparis Ahli. 4. 33 Provinsi telah melaksanakan penelusuran Arsip Aset 5. 33 Provinsi telah memiliki Daftar Arsip Aset hasil penelusuran 6. 33 Provinsi telah menyediakan prasarana dan sarana. 7. 33 Provinsi menyampaikan laporan hasil penelusuran Arsip Aset kepada ANRI. 8. ANRI melakukan monitoring pelaksanaan penelusuran Arsip Aset di 33 Provinsi. 9. 315 Kabupaten/Kota melaksanakan penelusuran Arsip Aset di wilayahnya. 10. 315 Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil penelusuran Arsip aset kepada ANRI dan Provinsi. 11. ANRI memfasilitasi pembangunan depot untuk penyimpanan arsip vital/Arsip aset. 12. Bimbingan teknis pengelolaan Arsip aset pada pemerintah kabupaten/kota (315 Kabupaten/Kota dari 22 Provinsi). 	

No.	Program	Kegiatan ANRI	Renja Arsip Nasional Republik Indonesia			Keterangan
			2011	2012	2013	
				14. Bimbingan teknis Pengelolaan Arsip Aset pada pemerintah daerah provinsi (33 provinsi).		
2.	Penataan Jumlah, Distribusi dan Kualitas PNS	1. Pemetaan Kebutuhan Arsiparis secara Nasional		Penyusunan konsep pemetaan kebutuhan arsiparis.	Pembahasan dan pengesahan konsep pemetaan kebutuhan arsiparis.	
		2. Peningkatan Jumlah Arsiparis sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	1. Sosialisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya Sebanyak 60 orang arsiparis. 2. Pemilihan arsiparis teladan tingkat nasional sebanyak 100 orang.	1. Sosialisasi pengembangan dan peraturan tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya sebanyak 60 orang arsiparis. 2. Temu teknis Sumber Daya Manusia Kearsipan sebanyak 100 orang 3. Pendidikan dan pelatihan penciptaan arsiparis tingkat ahli 30 orang.	1. Apresiasi dan Temu Teknis Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan sebanyak 150 orang. 2. Temu teknis Sumber Daya Manusia Kearsipan sebanyak 100 orang 3. Pendidikan dan pelatihan penciptaan arsiparis tingkat ahli 30 orang. 4. Pendidikan dan pelatihan penciptaan arsiparis tingkat terampil 15 orang.	
		3. Pendidikan dan Pelatihan Arsiparis	1. Pendidikan dan pelatihan arsiparis tingkat ahli 2 angkatan masing-masing 30 peserta. 2. Pendidikan dan pelatihan arsiparis tingkat terampil 2 angkatan masing-masing 25 peserta.	1. Pendidikan dan pelatihan arsiparis tingkat ahli 1 angkatan 35 peserta. 2. Pendidikan dan pelatihan arsiparis tingkat terampil 1 angkatan 25 peserta.	1. Pendidikan dan pelatihan arsiparis tingkat ahli 1 angkatan 30 peserta 2. Pendidikan dan pelatihan arsiparis tingkat terampil 1 angkatan 30 peserta.	
		4. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kearsipan	18 jenis pendidikan dan pelatihan teknis 5.113 orang peserta.	18 jenis pendidikan dan pelatihan teknis 2253 orang peserta.	15 jenis pendidikan dan pelatihan teknis 2.135 orang peserta.	
		5. Fasilitas Bantuan Beasiswa untuk Arsiparis Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	Bantuan beasiswa telah diberikan kepada pegawai/arsiparis ANRI Diploma IV/SI 68 orang S2 dalam negeri 54 orang S3 dalam negeri 4 orang S3 luar negeri 1 orang	Bantuan beasiswa telah diberikan kepada pegawai/arsiparis ANRI Diploma IV/SI 50 orang S2 dalam negeri 30 orang S3 dalam negeri 2 orang S3 luar negeri 3 orang	Bantuan beasiswa telah diberikan kepada pegawai/arsiparis ANRI Diploma IV/SI 85 orang S2 dalam negeri 15 orang S3 dalam negeri 3 orang S3 luar negeri 5 orang New inisiatif bantuan beasiswa sebanyak 100 orang terdiri dari 34 orang instansi pusat 66 orang instansi daerah.	

No.	Program	Kegiatan ANRI	Renja Arsip Nasional Republik Indonesia			Keterangan
			2011	2012	2013	
3.	Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka	1. Sistem Rekrutmen dan Pendistribusian Jabatan Fungsional Arsiparis secara Terpusat	Uji kompetensi jabatan fungsional arsiparis kepada 100 orang.	Pengembangan sistem <i>e-recruitment</i> dan penghitungan formasi arsiparis.	Pengembangan sistem <i>e-recruitment</i> dan uji kompetensi jabatan fungsional arsiparis.	Berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 30 pengadaan Arsiparis akan dilakukan terpusat. Oleh karena itu, Tahun 2013 diusulkan oleh 3 unit yaitu: - Direktorat Akreditasi dan Profesi Kearsipan - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan - Biro Hukum dan Kepegawaian
4.	Profesionalisme PNS	1. Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional Arsiparis Tingkat Terampil	Penyusunan Peraturan Presiden tentang Batas Usia Pensiun.	Sosialisasi Peraturan Presiden tentang Batas Usia Pensiun sebanyak 90 orang.		
		2. Penyusunan Standar Kompetensi Pejabat Fungsional Arsiparis			Kajian oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan tentang kompetensi arsiparis pada lembaga negara tingkat kementerian (target 1 naskah kajian).	
		3. Sertifikasi SDM Kearsipan	70 orang peserta ujian sertifikasi SDM kearsipan sebagai berikut: 63 orang ikut ujian dengan hasil: - 10 orang lulus sertifikasi bidang kompetensi tim penilai arsiparis - 17 orang lulus sertifikasi bidang kompetensi JRA.	90 orang peserta ujian sertifikasi SDM kearsipan	90 orang peserta ujian sertifikasi SDM kearsipan	
		4. Peningkatan Apresiasi Kearsipan bagi Kepala Lembaga Kearsipan Daerah dan Unit Kearsipan	1. Rapat Koordinasi Kearsipan tingkat pusat. 2. Pemilihan unit kearsipan teladan tingkat pusat dan daerah. 3. Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Teladan (LKD) (6 Finalis-terlaksana)	1. Rapat Koordinasi Kearsipan tingkat pusat. 2. Pemilihan unit kearsipan teladan tingkat pusat dan daerah.	1. Rapat Koordinasi Kearsipan tingkat pusat. 2. Pemilihan unit kearsipan teladan tingkat pusat dan daerah. 3. Penyelenggaraan pemilihan LKD Teladan (6 Finalis-terlaksana)	
		5. Bimbingan Teknis untuk Pejabat Fungsional Arsiparis	1. 3 (tiga) Instansi Daerah (Sumatera Utara, Bengkulu, Sulawesi Tenggara). 2. 3 (tiga) Instansi Pusat (Universitas Pendidikan Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Mahkamah Agung) target 300 orang arsiparis.	1. 3 (tiga) Instansi Daerah (Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Selatan, Bali, Sumatera utara). 2. 8 (delapan) Instansi Pusat (BPPT, Universitas, rumah Sakit, BPOM, Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia, Kementerian Pertahanan RI, BATAN) target 360 orang arsiparis.	1. 10 (sepuluh) Instansi Daerah (Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Papua). 2. 8 (delapan) Instansi Pusat target 390 orang arsiparis.	

No.	Program	Kegiatan ANRI	Renja Arsip Nasional Republik Indonesia			Keterangan
			2011	2012	2013	
		6. Bimbingan Teknis untuk SDM Kearsipan Non-Arsiparis	Untuk Internal Arsip Nasional RI telah dilaksanakan 11 Jenis Bimtek sebagai berikut: Kursus Pelayanan Prima (12 orang), Kursus Komputer (7 orang), Diklat teknis Pegawai (42 orang), Diklat <i>Character Building</i> eselon I dan Eselon II (20 orang), Diklat <i>Character Building</i> eselon III dan Eselon IV (90 orang), Diklat <i>Character Building</i> pejabat fungsional (109 orang), Diklat <i>Character Building</i> staf (320 orang), Penanganan Bencana Kebakaran (25 orang), Penanganan Bencana Gempa Bumi (25 orang), Pembekalan Pegawai Menjelang Pensiun (11 orang), dan Penegakkan Disiplin Pegawai ANRI.	Untuk Internal Arsip Nasional RI akan dilaksanakan 7 Jenis Bimtek sebagai berikut: Kursus Komputer (15 orang), Training of Trainer (15 orang), Diklat <i>Character Building</i> Struktural (112 orang), Diklat <i>Character Building</i> Fungsional Tertentu (151 orang), Diklat <i>Character Building</i> Fungsional Umum (284 orang), Diklat Teknis Pegawai (50 orang), Penegakkan Disiplin Pegawai.	Untuk Internal Arsip Nasional RI akan dilaksanakan 5 Jenis Bimtek sebagai berikut: Kursus Teknologi informasi (15 orang), Diklat Analisis Beban Kerja (15 orang), Diklat Menjelang Pensiun (20 Orang), Diklat barang dan Jasa (5 orang), Diklat Teknis Pegawai (50 orang).	
5.	Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (<i>E-Government</i>)	1. Pengembangan SIKD dan SIKS meliputi <i>e-record</i> termasuk <i>e-correspondence</i> dan <i>e-archives</i>	<ol style="list-style-type: none"> Implementasi Aplikasi Sistem Informai Kearsipan Statis (SIKS) pada pemerintah kabupaten/kota (20 Kabupaten/kota terlaksana) Kegiatan Pengembangan SIKD diawali dengan survei kesiapan kemudian penyusunan dan pembahasan instrumen, serah terima dan implementasi, dan pendampingan dan evaluasi. Target penerapan di 15 instansi pusat (MPR-RI, LAN, BPPT, MENPAN, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, LAPAN, Komisi Yudisial, Universitas Mataram, Universitas Udayana, Universitas Negeri Malang, PT. Semen Padang, PT. Semen Gresik Tbk., PT Pupuk Sriwijaya 	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan Pengembangan SIKD diawali dengan survei kesiapan kemudian penyusunan dan pembahasan instrumen, serah terima dan implementasi, dan pendampingan dan evaluasi. Target penerapan di 15 Instansi Pusat (DPR-RI, Kemempora, Kemenkosesra, Perpustakaan Nasional, BKN, Bappenas, Kemenkeu, Kemensos, UNDIP, UNPAD, IPB, UNSRAT, PT ASKES, PT PELINDO II, PT Pupuk Kaltim, PT Inka Madiun) Pengembangan Standar Fungsionalitas Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan: 1 (satu) NSPK 	<ol style="list-style-type: none"> Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) berbasis TIK pada pemerintah daerah prov/kb/kota (17 provinsi) Kegiatan Pengembangan SIKD diawali dengan survei kesiapan kemudian penyusunan dan pembahasan instrumen, serah terima dan implementasi, dan pendampingan dan evaluasi. Target penerapan di 29 Instansi Pusat dan Perguruan Tinggi Negeri Pengembangan Spesifikasi Teknis dan Ketentuan Fungsional untuk Peningkatan Kapasitas Aplikasi SIKD: 1 (satu) NSPK Pengembangan Aplikasi SIKD yang Telah Ditingkatkan Kapasitas Sistemnya: 1 (satu) aplikasi Pembinaan Manajemen Arsip Statis Dalam Rangka Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) berbasis TIK pada pemerintah daerah prov/kab/kota (16 Provinsi) 	
		2. Pengembangan SIKN dan Pembentukan JIKN	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Prototipe Aplikasi SIKN: 1 (satu) aplikasi Pengembangan Pedoman Penyelenggaraan SIKN dan JIKN: 1 (satu) NSPK 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Aplikasi SIKN: 1 (satu) aplikasi Peningkatan Kapasitas Sistem JIKN di Pusat Jaringan: 1 (satu) aplikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uji Coba Implementasi Aplikasi SIKN dan JIKN di ANRI dan Simpul Jaringan Instansi Pusat: 3 (tiga) instansi. 2. Uji Coba Implementasi Aplikasi SIKN dan JIKN di ANRI dan Simpul Jaringan Instansi Daerah: 4 (empat) instansi 	
			<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Standar Elemen Data Arsip Dinamis dan Statis untuk Penyelenggaraan SIKN: 1 (satu) NSPK Pengembangan Klasifikasi dan Tesaurus Kearsipan Nasional untuk Penyelenggaraan SIKN: 1 (satu) NSPK Pengembangan Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Arsip untuk Penyelenggaraan SIKN: 1 (satu) NSPK 	<ol style="list-style-type: none"> Pengkajian Persiapan Implementasi SIKN dan JIKN: 1 (satu) kajian Penggunaan SIKN dan JIKN: 8.760 kali Pengelolaan Basisdata SIKN dan JIKN, 15.000 record 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan Aplikasi Transaksional untuk Penyelenggaraan SIKN: 1 (satu) aplikasi Pengembangan Aplikasi Modul Helpdesk Nasional Sistem Informasi Kearsipan: 1 (satu) aplikasi Penggunaan SIKN dan JIKN: 10.512 kali 	

No.	Program	Kegiatan ANRI	Renja Arsip Nasional Republik Indonesia			Keterangan
			2011	2012	2013	
			6a. Penggunaan SIKN dan JIKN: 2 kali 6b. Pengelolaan Isi Portal JIKN, 1 (satu) paket 6c. Rakornas SIKN dan JIKN, 210 orang	5a. 5.Pengelolaan Isi Portal JIKN, 1 (satu) paket 5b. 5.Rakornas SIKN dan JIKN, 210 orang 5c. 5.Sosialisasi SIKN dan JIKN: 1 (satu) paket	5a. 5.a. Pengelolaan Basisdata SIKN dan JIKN, 30.000 record 5b. 5.b. Pengelolaan Basisdata SIKN dan JIKN, 30.000 record 5c. 5.c. Pengelolaan Isi Portal JIKN, 1 (satu) paket 5d. 5.d.Rakornas SIKN dan JIKN, 210 orang 5e. 5.d. Sosialisasi SIKN dan JIKN: 1 (satu) paket	
		3. Layanan Arsip Statis secara Elektronik	Target entri data informasi arsip statis 80 inventaris Arsip Republic (\pm 24.000 deskripsi) telah dihimpun dalam metadata pada server Jibang Sistem Informasi Kearsipan Statis.	Meminta informasi pada 12 inventaris arsip hasil pengolahan tahun 2011 segera dihimpun dalam metadata SIKS.	1. Diharapkan seluruh hasil pengolahan arsip statis tahun 2012 yang menggunakan komputer langsung dihimpun dalam metadata SIKS. 2. 1. Pengembangan Spesifikasi Teknis dan Ketentuan Fungsional untuk Peningkatan Kapasitas Aplikasi SIKS: 1 (satu) NSPK. 3. 2. Pengembangan Aplikasi SIKS yang Telah Ditingkatkan Kapasitas Sistemnya: 1 (satu) aplikasi	
6.	Penyederhanaan Perizinan Usaha	1. Penyederhanaan Mekanisme Persetujuan Jadwal Retensi Arsip	Konsultasi Penyusunan JRA Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota (6 Provinsi/Kabupaten/Kota terlaksana)	Workshop tentang Perumusan JRA Keuangan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota (500 orang)	Workshop tentang Perumusan JRA Kepegawaian kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota (500 orang)	
		2. Optimalisasi Pelayanan Arsip Statis	1. Dengan tersertifikasinya Direktorat Pemanfaatan 2. Telah terjadinya penyederhanaan akses terhadap Layanan Arsip Statis di Ruang Baca (Ruang Layanan)	1. Membantu peneliti asing untuk mendapat izin penelitian dari BPPT dan memfasilitasi perpanjangan izin. 2. Penghapusan semua surat izin/rekomendasi bagi pemilik kartu pengguna yang berasal dari dalam negeri	1. Penyelenggaraan program <i>leges</i> bagi autentifikasi arsip yang berasal dari khazanah arsip ANRI, sebagai alat kontrol dan antisipasi penyalahgunaan <i>copy</i> arsip/hasil alih media di ruang publik.	
			3. Kecuali izin bagi peneliti asing yang harus mendapatkan izin dari BPPT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006. 4. Mengeluarkan kartu anggota kartu pengguna.			
7.	Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri		1. Melaporkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) ke KPK berdasarkan SK wajib lapor (31 orang)	1. Revisi SK wajib lapor terbaru. Revisi dilakukan didasari adanya wajib lapor baru yang telah pensiun 2. Pelaporan LHKPN kepada KPK sesuai SK terbaru	1. Revisi SK wajib lapor terbaru. Revisi dilakukan didasari adanya wajib lapor baru dan yang telah pensiun 2. Pelaporan LHKPN kepada KPK sesuai SK terbaru	
8.	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri	1. Peningkatan Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis	Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Konsep Peraturan Presiden tentang tunjangan jabatan fungsional arsiparis sebanyak 107 orang Arsiparis.	Penyusunan Konsep dan Pembahasan Peraturan Presiden tentang tunjangan jabatan fungsional .	Sosialisasi Peraturan Presiden tentang tunjangan jabatan fungsional arsiparis.	

No.	Program	Kegiatan ANRI	Renja Arsip Nasional Republik Indonesia			Keterangan
			2011	2012	2013	
		2. Penyampaian Usulan Revisi Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis			Penyusunan usul revisi Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis	
9.	Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai	-	Efisiensi pemakaian dan penggunaan sumber daya listrik dan air melalui penerbitan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).	Peningkatan efisiensi pemakaian dan penggunaan sumber daya listrik dan air hingga 20% dengan cara mengurangi penggunaan penerangan pada setiap ruang kerja dan ruang rapat.	Peningkatan efisiensi pemakaian dan penggunaan sumber daya listrik dan air hingga 30 % dengan cara mengurangi penggunaan penerangan pada setiap ruang kerja dan ruang rapat dan pengaturan tata udara (AC)	

Jakarta, Februari 2012
Inspektur
Arsip Nasional Republik Indonesia

Andi Kasman, SE., MM.